



Akses ke Malioboro...

Sekda DIY Gatot Saptadi menjelaskan keberadaan PKL tidak bisa langsung dihilangkan dari kawasan Malioboro. Meski begitu, Pemda tetap akan menata. Apalagi, Malioboro selama ini menjadi ikon wisata belanja di Jogja. PKL Malioboro akan ditata agar lebih rapi dan tidak semrawut.

"Agar terlihat bagus, posisi PKL nantinya diubah. Kalau selama ini ada PKL yang melekat pada toko, nempel di toko maka ke depan akan diubah. Tidak ada lagi PKL yang nempel di toko," katanya.

Sebagai gantinya, PKL yang selama ini nempel di toko-toko sehingga mengganggu akses orang masuk toko ditempatkan secara berdempetan. Mereka akan dijejerkan di sepanjang tiang-tiang (pilar depan) toko. PKL juga dilarang menggelar dagangannya di jalur pedestrian, termasuk rombongannya.

"Nanti ada PKL yang menghadap toko, ada yang menghadap pedestrian. Jadi undur-unduran. Yang ada menghadap dan membelakangi toko. Kalau jualan di jalur pedestrian tentu akan ditertibkan," ujar Gatot.

Dengan begitu, diharapkan wisatawan yang datang bisa leluasa lewat dan nyaman berjalan-jalan lebih lama. Penataan tersebut akan dilaksanakan seiring rampungnya jalur pedestrian di sisi barat dan timur Malioboro.

Pemda DIY, kata Gatot, juga

menyiapkan lokasi PKL di Taman Parkir Beskalan. Hanya saja, tidak semua PKL bisa masuk karena keterbatasan lahan. "Berapa jumlah PKL yang bisa masuk, itu urusan Pemkot. Yang jelas, Malioboro akan ditata agar nyaman sebagai kawasan pedestrian," katanya.

Sebagai langkah awal, Pemda DIY akan melakukan uji coba Malioboro bebas dari kendaraan bermotor. Uji coba tersebut akan dilaksanakan pada Selasa Wage, 18 Juni mendatang. Kalau uji coba berjalan lancar, kebijakan tersebut bisa saja diteruskan hingga dua kali seminggu dan seterusnya. "Selama masa uji coba yang boleh lewat sepeda, andong, dan becak, dan angkutan umum bus *Trans Jogja*," kata Gatot.

Ketua Perkumpulan Pengusaha Malioboro-Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono menilai dengan adanya uji coba akan diketahui masalah-masalah yang akan ditimbulkan. Terutama bagi warga yang tinggal di Malioboro. Bagi PPMAY, ide melarang kendaraan bermotor masuk Malioboro justru menambah persoalan. "Kami juga khawatir jika nanti omzet pemilik toko bisa turun drastis," katanya.

Setidaknya keresahan itu diutarakan oleh Sodikin, salah seorang pemilik toko di Malioboro. Penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sejak 2015

lalu justru menjadi momok bagi pelaku usaha. Keluh kesah mereka karena omzet menurun sejak orang tak bisa parkir di depan toko tidak pernah didengar. "Belum lagi masalah PKL yang jumlahnya sudah tidak proporsional. Saat ini, meskipun ditata, kondisi Malioboro terlihat kumuh," kata Sodikin.

Kekumuhan Malioboro, kata Sodikin, terlihat dari berjubelnya para PKL. Ruang pedestrian yang dijanjikan nyaman tak seindah yang dirasakan. Lalualang orang yang lewat harus tersendat dengan keberadaan dagangan PKL yang memakan trotoar. Belum lagi akses masuk ke toko yang dirasa sempit. "Uji coba yang digelar Selasa Wage, saat tidak ada PKL itu bagaimana? Apa yang akan dilihat? Harusnya di luar hari itu agar seluruh persoalan bisa dilihat secara gamblang," ujar Yulianto, pemilik toko sepatu di Malioboro.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Rudiarto mengaku masih khawatir dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut. Salah satunya, terkait akses bagi para wisatawan, masyarakat dan penghuni di Malioboro. "Sedikit banyak akan merugikan. Orang bisa enggan datang ke Malioboro. Tapi uji coba ini juga penting, kalau belum diujicobakan jadi tidak tahu juga dampak yang ditimbulkannya," kata Rudi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005